Social Investment
Knowledge Pod

Wadah artikulasi gagasan dan riset tentang investasi sosial yang memperkuat akuntabilitas, nilai keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.

Social Investment Indonesia

Artikel No. 153, Mei 2026

Menyelamatkan SROI dari Tirani Angka

Usulan Standar Pengungkapan Lima komponen untuk Konteks Indonesia



Oleh:
Purnomo
Senior Advisor
Social Investment Indonesia
Email: purnomo@socialinvestment.id



W. Aris Darmono
Senior Advisor
Social Investment Indonesia
Email: aris@socialinvestment.id

Abstrak

Artikel ini mengkritisi kecenderungan reduksi Social Return on Investment (SROI) menjadi sekadar angka rasio tanpa konteks, yang berisiko memicu praktik impact washing. Meskipun SROI dibangun di atas metodologi yang ketat, komunikasi publiknya sering kali menyederhanakan kompleksitas analisis menjadi satu angka yang sulit diverifikasi. Untuk mengatasi asimetri informasi tersebut, tulisan ini mengusulkan standar pengungkapan lima komponen yang ringkas dan kontekstual. Standar ini dirancang agar setiap publikasi SROI tetap transparan, mudah dipahami, dan akuntabel, sekaligus relevan dengan kebutuhan ekosistem keberlanjutan di Indonesia yang berkembang pesat.

Kata Kunci: SROI, Investasi Sosial, Dampak Sosial, Pengambilan Keputusan, Metodologi, Pembelajaran Organisasi.

Pendahuluan: Ketika Rasio Menjadi Tirani

Bayangkan sebuah laporan keberlanjutan perusahaan yang mencantumkan satu kalimat di tengah halaman yang dirancang dengan rapi: “SROI program kami adalah 1 : 4,8.” Tidak ada penjelasan, tidak ada konteks. Angka itu kemudian beredar di siaran pers, di paparan investor, di laporan tahunan, dalam pidato pejabat perusahaan, dan akhirnya dalam pemberitaan media. Pada titik tertentu, ia bahkan tidak lagi dipertanyakan. Pembaca menerima angka itu sebagai fakta,

sebagaimana mereka menerima nilai gizi yang tertera pada kemasan minuman kemasan: tampak presisi, tampak otoritatif, dan karena itu tampak benar.

Padahal, di balik angka itu, mungkin ada atau mungkin tidak ada, pekerjaan metodologis yang panjang. Pemetaan pemangku kepentingan yang serius. Wawancara mendalam dengan penerima manfaat. Teori perubahan yang dibangun secara partisipatif. Pencarian proxy keuangan yang sesuai. Empat penyesuaian klasik: deadweight, attribution, displacement, drop-off. Verifikasi pihak ketiga. Atau, sebaliknya, mungkin di balik angka itu hanya ada selembar tabel yang disusun tergesa-gesa oleh konsultan yang tidak pernah benar-benar turun ke lapangan, dengan asumsi yang tidak pernah diuji. Pembaca tidak memiliki cara untuk membedakan keduanya.

Inilah paradoks yang kini dihadapi Social Return on Investment (SROI). Ia lahir sebagai metodologi yang dirancang justru untuk mendisiplinkan klaim sosial memaksa organisasi mendengarkan pemangku kepentingan, menelusuri perubahan yang sungguh-sungguh terjadi, dan tidak melebih-lebihkan dampak yang sebenarnya tidak ada. Tetapi karena hasil akhirnya kerap diterjemahkan ke publik dalam bentuk satu angka rasio yang sangat mudah dikutip dan sangat menarik secara visual, kekuatan komunikatif itu berbalik melawan dirinya sendiri. Rasio menjadi tirani: ia memberi kesan bahwa angka itu sudah cukup, dan substansi di belakangnya tidak perlu lagi diperiksa.

Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia perlu, dan lebih penting lagi, dapat merumuskan sebuah standar pengungkapan SROI yang ringkas, sederhana, dan wajib disertakan setiap kali angka rasio SROI dipublikasikan. Standar itu tidak perlu rumit. Ia hanya perlu memaksa lima informasi kontekstual untuk selalu bergerak bersama angka, sehingga pembaca yang skeptis dapat segera menilai bobot angka tersebut. Dengan analogi yang mudah dipahami: kita membutuhkan label gizi untuk SROI.

Argumentasi tulisan ini akan dibangun dalam tiga babak. Pertama, mendiagnosis mengapa SROI hari ini rentan menjadi alat *impact washing* meskipun lahir dari tradisi metodologis yang ketat. Kedua, menjelaskan mengapa kerangka internasional yang ada, meskipun bermanfaat, belum cukup untuk menjawab persoalan komunikasi publik di tingkat negara. Ketiga, mengusulkan sebuah standar pengungkapan lima komponen yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia, dengan jalur adopsi yang realistis.

SROI: metodologi yang disiplin, komunikasi yang rapuh

SROI dikembangkan pada akhir 1990-an oleh Roberts Enterprise Development Fund di Amerika Serikat, dan kemudian disistematisasi oleh SROI Network, yang kini menjadi Social Value International (SVI) dengan dukungan komunitas praktisi global, lembaga filantropi, dan akademisi. Tujuan awalnya sederhana namun ambisius: memberikan kerangka yang memungkinkan organisasi sosial, lembaga pemerintah, dan perusahaan menelusuri, menilai, dan mengkomunikasikan nilai sosial yang mereka ciptakan dalam bahasa yang dapat dipahami baik oleh pemberi dana maupun oleh pelaku bisnis.

Dalam bentuknya yang matang, SROI berdiri di atas delapan prinsip yang menjadi tulang punggung integritas metodologisnya: melibatkan pemangku kepentingan, memahami perubahan yang sebenarnya terjadi, menghargai hal-hal yang penting bagi mereka yang mengalami perubahan, hanya memasukkan apa yang material, tidak mengklaim secara berlebihan, bersikap transparan, memverifikasi hasil, dan

menjadi responsif. Delapan prinsip ini bukan sekadar etika yang melayang di atas, ia adalah filter yang membedakan SROI dari sekadar latihan akuntansi sosial yang dangkal. Setiap prinsip menanamkan kewajiban yang spesifik: prinsip pertama, misalnya, menolak studi yang dirancang dari belakang meja tanpa kontak dengan komunitas; prinsip kelima menolak klaim yang menyederhanakan kontribusi pihak lain; prinsip keenam menuntut transparansi atas asumsi.

Dalam praktiknya, sebuah studi SROI yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh adalah pekerjaan berlapis. Praktisi memulai dengan pemetaan pemangku kepentingan, melakukan wawancara dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi perubahan yang dialami, menyusun teori perubahan yang menghubungkan input, output, outcome, dan dampak, mengumpulkan bukti perubahan melalui survei dan data sekunder, mencari proxy keuangan yang sesuai untuk memonetisasi outcome, lalu melakukan empat penyesuaian klasik. Deadweight: berapa persen perubahan yang akan tetap terjadi tanpa intervensi. Attribution: berapa persen perubahan yang sebenarnya disebabkan oleh aktor lain. Displacement: berapa persen perubahan yang sekadar menggeser dampak negatif ke tempat lain. Drop-off: penurunan dampak dari tahun ke tahun setelah intervensi berakhir.

Hasil akhirnya adalah sebuah laporan naratif yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan halaman, lengkap dengan asumsi yang dijelaskan, sumber proxy yang dikutip, batasan analisis yang diakui, dan analisis sensitivitas yang menunjukkan bagaimana rasio berubah jika asumsi-asumsi kunci digeser. Di tengah laporan itu, biasanya tidak di halaman pertama, terdapat satu angka rasio. Misalnya, 1 : 2,73. Angka itu, secara teknis, adalah hasil pembagian total nilai sosial yang telah dimonetisasi dan disesuaikan dengan total investasi yang dikeluarkan.

Persoalannya: hampir tidak ada pembaca dari kalangan publik luas yang sampai pada laporan setebal itu. Yang beredar adalah satu angka. Dan ketika satu angka berdiri sendiri tanpa konteks, seluruh pekerjaan metodologis di belakangnya menjadi tidak terverifikasi oleh pembaca biasa, dan yang lebih berbahaya, juga menjadi tidak terdeteksi ketika ia tidak ada. Inilah inti kerapuhan komunikasi SROI hari ini: metodologinya disiplin, tetapi cara ia menyentuh publik justru meninggalkan disiplin itu di balik pintu.

Anatomi 1 : 2,73 — apa yang sebenarnya disederhanakan oleh sebuah rasio

Untuk memahami mengapa pengungkapan menjadi penting, kita perlu membedah apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sebuah rasio SROI. Angka 1 : 2,73 yang tampak sederhana sebenarnya adalah hasil kompresi dari sederet keputusan metodologis yang masing-masing memiliki implikasi besar terhadap besaran akhir.

Pertama, angka itu mencerminkan keputusan tentang siapa yang dianggap sebagai pemangku kepentingan. Sebuah program literasi keuangan, misalnya, dapat dianggap memiliki pemangku kepentingan terbatas pada peserta langsung, atau diperluas mencakup keluarga peserta, lembaga keuangan mitra, regulator, dan komunitas tempat peserta tinggal. Pilihan cakupan ini akan menentukan jenis perubahan yang dimasukkan ke dalam analisis, dan pada akhirnya membentuk angka rasio. Dua studi SROI atas program yang nyaris identik dapat menghasilkan rasio yang sangat berbeda hanya karena keputusan pemetaan ini.

Kedua, angka itu mencerminkan keputusan tentang perubahan apa yang dianggap material. Prinsip materialitas dalam SROI menuntut bahwa hanya perubahan yang signifikan bagi pemangku kepentingan yang dimasukkan. Tetapi "signifikan" adalah konsep yang dapat ditarik longgar atau ketat. Praktisi yang ingin memperbesar rasio dapat memasukkan sebanyak mungkin perubahan; praktisi yang konservatif akan memilih hanya perubahan yang paling kuat buktinya. Dua pendekatan ini menghasilkan dunia yang berbeda.

Ketiga, angka itu mencerminkan pilihan proxy keuangan. Ketika kita memonetisasi nilai dari "peningkatan rasa percaya diri", "berkurangnya konflik keluarga", atau "peningkatan akses terhadap layanan kesehatan", kita harus memilih harga proksi yang akan digunakan. Apakah proxy yang dipilih bersumber dari publikasi resmi, dari studi akademik, atau dari estimasi internal? Apakah ia direvisi setiap tahun atau dibekukan dari analisis lama? Apakah ia disesuaikan dengan inflasi dan konteks lokal? Setiap pilihan ini memindahkan angka rasio ke arah tertentu.

Keempat, dan mungkin yang paling menentukan, angka itu mencerminkan empat penyesuaian. Sebuah program yang menerapkan deadweight 5%, attribution 0%, displacement 0%, dan drop-off 0% praktis mengklaim bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah miliknya sendiri dan akan terus berlangsung selamanya. Sebuah program yang menerapkan deadweight 35%, attribution 25%, displacement 10%, dan drop-off tahunan 20% mengakui bahwa banyak hal terjadi karena faktor lain dan dampaknya akan menyusut. Dua pendekatan yang sama-sama menerapkan SROI dapat menghasilkan rasio yang berbeda dua atau tiga kali lipat hanya karena perbedaan filosofi penyesuaian.



Tabel berikut menunjukkan parameter teknis yang biasanya disembunyikan di balik sebuah rasio namun sangat menentukan integritas hasil:

Parameter SROI	Fungsi dan Dampak terhadap Rasio	Risiko Tanpa Pengungkapan
Deadweight	Mengurangi nilai yang akan tetap terjadi tanpa program.	Overclaiming dampak yang sebenarnya terjadi secara alami.
Attribution	Mengurangi nilai yang disebabkan oleh aktor atau faktor lain.	Mengklaim keberhasilan pihak lain sebagai milik sendiri.
Displacement	Mengurangi nilai jika dampak positif di satu tempat menggeser masalah ke tempat lain.	Mengabaikan efek samping negatif dari intervensi.
Drop-off	Mengurangi nilai dari tahun ke tahun setelah program berakhir.	Melebih-lebihkan durasi manfaat jangka panjang.

Kelima, angka itu mencerminkan periode dan unit analisis. Apakah rasio tersebut dihitung untuk satu tahun investasi, lima tahun siklus program, atau seluruh proyeksi nilai hingga drop-off habis? Apakah ia mencakup hanya satu lokasi atau seluruh portofolio nasional? Periode yang lebih panjang umumnya menghasilkan rasio yang lebih besar karena akumulasi nilai, sementara periode yang lebih pendek lebih konservatif.

Yang ingin kami tunjukkan dengan pembedahan ini bukan bahwa SROI adalah metodologi yang lemah; sebaliknya, kekuatannya justru terletak pada kesadaran bahwa setiap keputusan metodologis ini ada dan harus dipertanggungjawabkan. Yang lemah adalah cara kita mengkomunikasikannya. Ketika angka 2,73 disampaikan tanpa pengungkapan apa pun, seluruh kompleksitas yang membentuknya disembunyikan, dan ruang interpretasi pembaca menjadi sangat tidak setara dengan ruang interpretasi penyusun studi. Inilah ketidakseimbangan informasi yang dimanfaatkan oleh praktik *impact washing*.

Impact washing: bentuk halus dari ketidakjujuran metodologis

Istilah *impact washing* meminjam logika greenwashing: praktik mengklaim dampak sosial atau lingkungan yang lebih besar, lebih murni, atau lebih kredibel daripada yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kebohongan biasa, *impact washing* jarang berbentuk pernyataan yang secara harfiah salah. Ia bekerja melalui seleksi, omisi, agregasi, dan framing yang semuanya secara teknis dapat dipertahankan, tetapi secara substantif menyesatkan.

Setidaknya ada lima bentuk *impact washing* yang relevan dalam konteks SROI. Pertama, selection washing: organisasi memiliki dua puluh program, tetapi hanya mempublikasikan SROI dari tiga program terbaik. Pembaca menyimpulkan bahwa kinerja sosial perusahaan baik secara keseluruhan, padahal yang mereka lihat adalah cherry-picked sample. Kedua, methodology washing: organisasi menggunakan metodologi yang lebih ringan. Misalnya estimasi internal tanpa keterlibatan stakeholder, tetapi mempublikasikan hasilnya menggunakan label yang sama dengan studi yang dilakukan secara penuh.

Pembaca tidak dapat membedakan mana yang dilakukan oleh praktisi tersertifikasi dan mana yang dilakukan oleh tim komunikasi internal.

Ketiga, aggregation washing: organisasi menjumlahkan nilai sosial dari banyak program ke dalam satu angka tunggal yang besar dan menarik, tanpa menjelaskan bahwa angka itu adalah agregasi yang menggabungkan studi-studi dengan kualitas, periode, dan asumsi yang berbeda-beda. Pembaca menyimpulkan bahwa ada satu angka yang dapat dibandingkan, padahal yang ada adalah tumpukan apel dan jeruk. Keempat, omission washing: organisasi mempublikasikan rasio tanpa menyebutkan tingkat *deadweight, attribution*, dan *drop-off* yang digunakan, sehingga pembaca tidak tahu bahwa rasio besar tersebut bisa jadi hanya berlaku jika asumsi yang sangat agresif diterima. Kelima, provider washing: organisasi mengandalkan "verifikasi" pihak ketiga yang sebenarnya adalah konsultan yang dibayar oleh perusahaan yang sama, atau yang tidak memiliki kompetensi independen.

Bahaya *impact washing* tidak berhenti pada satu organisasi. Ia mencemari ekosistem. Ketika beberapa pelaku menggunakan klaim yang berlebihan untuk menarik investor, mendapat penghargaan, atau memenuhi target ESG, pelaku yang melakukan praktik baik akan terlihat kurang menarik secara komparatif. Dalam jangka panjang, ini menciptakan tekanan menurun di mana semua orang merasa harus menggembungkan angka agar tidak kalah dalam persaingan reputasi. Akibatnya, SROI sebagai disiplin kehilangan kredibilitas. Investor mulai mengabaikan angkanya. Regulator mulai mencurigai. Akademisi mulai meragukan. Inilah jalan terburuk: bukan kepalsuan yang terungkap, tetapi keraguan yang menumpuk hingga seluruh disiplin dianggap tidak serius.

Yang penting dipahami adalah bahwa *impact washing* tidak selalu disengaja. Ia sering muncul karena tekanan struktural: tenggat waktu pelaporan yang ketat, tim komunikasi yang ingin pesan sederhana, manajemen yang ingin angka yang mengesankan, konsultan yang ingin mempertahankan klien. Tanpa standar pengungkapan yang memaksa konteks ikut beredar bersama angka, jalan menuju *impact washing* adalah jalan dengan resistensi paling rendah. Standar pengungkapan, dengan demikian, bukan sekadar instrumen etika, ia adalah desain insentif.

Mengapa praktik baik tidak otomatis menjadi norma

Pembaca yang skeptis mungkin akan bertanya: jika delapan prinsip SVI sudah ada, jika laporan SROI yang lengkap memang dibuat oleh praktisi yang serius, mengapa kita masih membutuhkan standar pengungkapan tambahan? Jawabannya berkaitan dengan ekonomi informasi dan ekonomi perhatian.

Ekonomi informasi mengajarkan bahwa di mana ada asimetri informasi yang besar antara pengirim pesan dan penerima pesan, dan di mana tidak ada mekanisme verifikasi yang murah, ruang untuk klaim yang menyesatkan akan terus terbuka. Dalam praktik SROI hari ini, asimetri itu sangat nyata: penyusun studi tahu seluruh asumsi, batasan, dan pilihan metodologis; pembaca hanya tahu satu angka. Untuk menutup asimetri ini, pembaca harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, membaca laporan ratusan halaman, memahami terminologi teknis, mengevaluasi proxy keuangan, menilai kewajaran asumsi. Hampir tidak ada pembaca yang bersedia atau mampu mengeluarkan biaya itu.

Ekonomi perhatian menambah lapisan kedua. Bahkan jika laporan lengkap tersedia, perhatian publik adalah komoditas yang langka. Dalam dunia di mana laporan keberlanjutan harus bersaing

dengan ribuan informasi lain, hanya pesan yang ringkas dan menarik yang akan masuk ke kesadaran pembaca. Maka angka rasio menjadi pemenang alami, dan konteks menjadi korban alami. Tidak ada konspirasi di sini, hanya hasrat ekonomi.

Kedua dinamika ini diperburuk oleh masalah principal-agent dalam ekosistem konsultansi. Praktisi SROI yang bekerja sebagai konsultan dibayar oleh organisasi yang dievaluasi. Meskipun banyak praktisi memiliki integritas tinggi dan sertifikasi formal, struktur insentif tetap menciptakan tekanan implisit untuk menghasilkan angka yang menyenangkan klien. Organisasi yang mendapat rasio rendah cenderung tidak mempublikasikannya; organisasi yang mendapat rasio tinggi akan mempublikasikannya secara agresif. Hasil akhirnya adalah bias seleksi sistemik dalam ekosistem laporan SROI yang tersedia di publik.

Standar pengungkapan yang baik tidak menyelesaikan semua masalah ini, tetapi ia memperkecil ruang gerak bagi praktik yang menyesatkan. Dengan memaksa lima komponen kontekstual selalu menyertai angka, ia mengurangi asimetri informasi (pembaca tahu lebih banyak), memenuhi ekonomi perhatian (informasi tetap ringkas), dan menciptakan jejak audit yang dapat ditelusuri (klaim yang berbeda dengan komponennya menjadi mudah ditandai).

Kerangka internasional: apa yang ada dan apa yang masih hilang

Pertanyaan berikutnya yang wajar diajukan: bukankah sudah ada banyak kerangka internasional yang menangani persoalan ini? Jawabannya: ya dan tidak. Ya, dalam arti bahwa ada beberapa kerangka yang menyentuh aspek-aspek dari persoalan ini. Tidak, dalam arti bahwa tidak ada satupun yang secara eksplisit merumuskan label pengungkapan publik yang ringkas untuk SROI.

Social Value International mengeluarkan delapan prinsip yang sudah disebutkan, dan menyusun standar pelaporan SROI yang menuntut laporan naratif lengkap. Standar ini sangat baik untuk audit dan akuntabilitas mendalam, tetapi tidak dirancang untuk komunikasi publik yang ringkas. Dalam praktik, organisasi yang patuh pada SVI tetap mempublikasikan angka rasio sebagai headline, sementara laporan lengkap tersedia di lampiran atau di situs web yang jarang dikunjungi.

Impact Management Project, yang kini dilanjutkan oleh Impact Frontiers, mengembangkan lima dimensi dampak: What, Who, How Much, Contribution, dan Risk. Kerangka ini sangat berguna untuk menstrukturkan analisis dampak, tetapi diorientasikan ke investor dampak yang menilai portofolio investasi, bukan ke pembaca laporan SROI yang melihat satu program. Lima dimensi ini diadopsi oleh GIIN, GRI, ISSB, dan UNDP, namun penerapannya di tingkat program tunggal tetap memerlukan terjemahan.

IRIS+, yang dikelola oleh Global Impact Investing Network, menyediakan katalog metrik dampak yang dapat digunakan untuk pelaporan portofolio. Lagi-lagi, ini adalah alat yang berguna untuk investor, tetapi tidak dirancang sebagai standar pengungkapan publik yang menyertai angka SROI tunggal. Global Reporting Initiative (GRI) mengeluarkan standar pelaporan keberlanjutan yang luas, termasuk modul tentang komunitas dan dampak sosial. International Sustainability Standards Board (ISSB) yang lebih baru, melalui IFRS S1 dan S2, menetapkan standar pengungkapan keberlanjutan untuk pelaporan

keuangan. Keduanya penting, tetapi fokusnya pada pengungkapan korporat secara umum, bukan pada pengungkapan dampak per program.

Operating Principles for Impact Management yang diinisiasi oleh IFC menetapkan sembilan prinsip untuk mengelola dampak dalam investasi. OECD-DAC Evaluation Criteria menyediakan kerangka untuk evaluasi program pembangunan. Keduanya kontribusi penting, tetapi tidak menjawab persoalan komunikasi publik atas angka SROI.

Di mana letak celah yang tersisa? Tidak ada satu pun kerangka di atas yang secara eksplisit menetapkan: jika Anda mempublikasikan angka SROI, maka Anda wajib menyertakan informasi kontekstual minimum X, Y, Z dalam format yang dapat dibaca dalam satu kalimat oleh pembaca awam. Inilah celah yang dapat diisi oleh standar pengungkapan lima komponen yang diusulkan tulisan ini. Kerangka internasional yang ada tetap relevan dan tetap harus diadopsi pada tingkat metodologi penyusunan studi. Standar pengungkapan lima komponen melengkapi mereka pada tingkat komunikasi publik, sebuah lapisan yang selama ini diabaikan justru karena dianggap "terlalu sederhana untuk distandarisasi".

Konteks Indonesia: mengapa kita justru membutuhkan standar yang ringkas

Argumen di atas berlaku universal, tetapi ada alasan spesifik mengapa Indonesia adalah konteks yang ideal untuk merintis standar pengungkapan SROI.

Pertama, ekosistem CSR Indonesia berskala besar dan terus tumbuh. Sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan tertentu, dan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk emiten dan lembaga jasa keuangan, jumlah laporan dampak yang dipublikasikan setiap tahun mencapai ribuan. Pertumbuhan ini menciptakan kebutuhan komunikasi yang masif, dan dengan demikian menciptakan ruang yang luas bagi *impact washing* jika tidak ada standar pengungkapan yang konsisten.

Kedua, profil pembaca laporan keberlanjutan di Indonesia sangat heterogen. Regulator dengan keterbatasan waktu, jurnalis tanpa pelatihan metodologis, anggota DPR yang ingin pesan sederhana, akademisi yang ingin presisi, masyarakat sipil yang ingin transparansi, dan investor institusional yang ingin perbandingan portofolio. Tidak realistis berharap semua kelompok ini akan membaca laporan SROI lengkap. Tetapi semua kelompok ini akan terbantu jika setiap angka SROI yang dipublikasikan disertai dengan pengungkapan ringkas yang dapat dibaca dalam tiga puluh detik.

Ketiga, komunitas praktisi SROI di Indonesia sudah cukup matang untuk mengadopsi standar bersama. Sertifikasi praktisi SROI sudah tersedia, asosiasi profesional dampak sosial sudah berdiri, dan jaringan konsultansi independen yang serius sudah terbangun. Komunitas ini berada pada titik yang tepat untuk merumuskan kode pengungkapan yang akan menjadi pembeda antara praktisi yang patuh dan yang tidak.

Keempat, dan mungkin yang paling penting secara strategis: regulator Indonesia berada pada titik di mana mereka mulai mempertimbangkan standar dampak sosial untuk pelaporan korporat. Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Sosial semuanya memiliki kepentingan dalam memastikan klaim dampak sosial dapat diuji. Jika komunitas praktisi tidak proaktif merumuskan standar pengungkapan dari dalam, regulator dapat memaksakan standar dari luar yang biasanya akan jauh lebih kaku, lebih birokratis, dan kurang sesuai dengan kebutuhan komunikasi yang sebenarnya.

Kelima, secara internasional, posisi pelopor dalam standar pengungkapan dampak akan memberi Indonesia keunggulan reputasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengikuti standar yang dibuat di tempat lain. Standar pengungkapan SROI ringkas adalah area di mana Indonesia dapat memimpin, dan kemudian menawarkan kerangka itu kepada jaringan praktisi global sebagai kontribusi dari Selatan global. Konteks ini bukan hanya menjadikan Indonesia siap untuk standar pengungkapan SROI, ia menjadikan Indonesia bertanggung jawab untuk merintisnya.

Usulan: lima komponen wajib

Setelah diagnosis dan konteks, kita masuk ke jantung tulisan ini: usulan konkret. Standar pengungkapan SROI yang diusulkan terdiri dari lima komponen wajib yang harus selalu menyertai setiap publikasi angka rasio SROI. Lima komponen itu adalah: pertama, periode evaluasi yang menjadi rujukan rasio; kedua, jumlah kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam analisis; ketiga, jumlah orang yang mengalami perubahan material; keempat, proporsi manfaat yang diterima oleh masing-masing kelompok pemangku kepentingan; dan kelima, komposisi nilai berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Satu ketentuan konsistensi yang mengikat: jumlah kelompok yang disebutkan dalam Komponen 2 harus sama persis dengan jumlah entri dalam Komponen 4, tidak lebih dan tidak kurang.

Format pengungkapannya terdiri dari kalimat naratif singkat (Komponen 1–3) diikuti dua baris data terstruktur (Komponen 4 dan 5), sehingga dapat ditempatkan di mana pun angka rasio dipublikasikan melalui siaran pers, paparan investor, laporan tahunan, materi pemasaran, atau wawancara media. Contoh format yang diusulkan adalah sebagai berikut:

> *SROI program ini sebesar 1 : 2,73 untuk periode 2023–2024, mencakup 7 kelompok pemangku kepentingan, dengan 33 orang mengalami perubahan material. Distribusi manfaat: petani peserta 28%, keluarga petani 16%, koperasi mitra 14%, pemerintah desa 12%, lembaga keuangan 10%, komunitas sekitar 12%, tenaga kerja program 8%. Komposisi nilai: sosial 34%, ekonomi 48%, lingkungan 18%.*

Format ini dapat dibaca dalam waktu kurang dari satu menit oleh pembaca paling sibuk sekalipun. Tetapi dalam beberapa baris itu, pembaca mendapatkan lima informasi kontekstual yang sangat menentukan bagaimana mereka harus menginterpretasikan angka 2,73.

Sebelum kita masuk ke setiap komponen secara mendalam, perlu ditegaskan bahwa standar pengungkapan ini tidak menggantikan laporan SROI lengkap. Laporan lengkap tetap wajib disusun dan tetap menjadi sumber rujukan utama bagi mereka yang ingin melakukan verifikasi mendalam. Standar

pengungkapan lima komponen adalah lapisan komunikasi publik, antarmuka pertama antara angka dan pembaca, yang berfungsi sebagai gerbang menuju transparansi yang lebih dalam.

Komponen 1 : periode evaluasi

Komponen pertama yang wajib disertakan adalah periode evaluasi yang menjadi rujukan rasio. Dalam contoh di atas, periode itu adalah 2023–2024. Komponen ini terlihat sederhana, hampir sepele, tetapi ia menjawab tiga risiko *impact washing* sekaligus.

Pertama, periode evaluasi mengikat rasio pada satu titik waktu tertentu, sehingga mencegah penggunaan angka dari studi lama untuk klaim hari ini. Ini adalah persoalan yang lebih sering terjadi daripada yang disadari. Sebuah perusahaan dapat melakukan studi SROI pada 2018, mendapatkan rasio 3,1, lalu terus mengutip angka itu dalam laporan tahunan 2019, 2020, 2021, hingga 2025, meskipun program tersebut sudah berubah, konteks ekonomi berubah, dan asumsi proxy berubah. Dengan mewajibkan periode disebutkan, pembaca dapat segera mengevaluasi apakah angka tersebut masih relevan.

Kedua, periode evaluasi mengungkap apakah angka tersebut bersifat ex-ante (proyeksi sebelum program dijalankan), interim (selama program berjalan), atau ex-post (setelah program selesai dan dampak terobservasi). Ketiga jenis SROI ini memiliki bobot epistemik yang berbeda. Studi ex-ante berisi banyak asumsi tentang masa depan; studi ex-post berdasarkan bukti aktual. Mencampuradukkan keduanya tanpa keterangan menjadi salah satu bentuk *impact washing* yang halus.

Ketiga, periode juga membantu pembaca memahami apakah rasio tersebut mencerminkan periode yang panjang (sehingga akumulasi nilai besar) atau periode yang pendek (sehingga rasio lebih konservatif). Sebuah rasio 1 :5 untuk periode lima tahun tidak dapat dibandingkan secara apel-ke-apel dengan rasio 1 :5 untuk periode satu tahun. Implementasi komponen ini juga sangat sederhana. Praktisi cukup menyebutkan tahun atau rentang tahun yang menjadi cakupan analisis. Tidak diperlukan kosa kata teknis atau format yang rumit.

Komponen 2: cakupan kelompok pemangku kepentingan

Komponen kedua adalah jumlah kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam analisis. Dalam contoh, jumlah itu adalah 7 kelompok. Komponen ini menjawab risiko *impact washing* yang berkaitan dengan kelengkapan perspektif dan keterwakilan suara dalam studi.

Salah satu kelemahan paling sering dalam studi SROI yang dilakukan dengan ringan adalah kelangkaan keterlibatan pemangku kepentingan. Studi yang hanya mewawancarai penerima manfaat langsung, tanpa berbicara dengan keluarga, komunitas sekitar, mitra pelaksana, pemerintah lokal, atau kelompok yang mungkin mengalami dampak negatif akan menghasilkan gambaran yang miring. Hampir selalu, gambaran itu lebih positif daripada realitas, karena suara yang berpotensi kritis tidak hadir di meja analisis.

Prinsip pertama SVI secara eksplisit menuntut keterlibatan pemangku kepentingan yang luas. Tetapi karena prinsip ini tidak dipublikasikan bersama angka, pembaca tidak punya cara untuk mengetahui

apakah prinsip itu dipatuhi atau tidak. Dengan mewajibkan jumlah kelompok pemangku kepentingan disebutkan dalam pengungkapan publik, kita menciptakan sinyal yang dapat segera dievaluasi: studi yang hanya melibatkan satu atau dua kelompok pemangku kepentingan layak dipertanyakan kualitasnya, tanpa harus membaca laporan lengkap.

Mengapa "kelompok" dan bukan "individu"? Karena yang ingin diukur adalah keluasan perspektif, bukan jumlah responden. Sebuah studi dapat mewawancarai dua ratus orang, tetapi semuanya berasal dari satu kelompok (misalnya petani peserta). Dibandingkan dengan studi yang mewawancarai lima puluh orang dari lima kelompok berbeda, studi pertama lebih lemah meskipun jumlah responnya lebih besar. Ukuran kelompok lebih relevan untuk menilai apakah studi berhasil menangkap kompleksitas sistem sosial yang dievaluasi.

Komponen ini juga memiliki efek edukatif. Ketika praktisi dan organisasi tahu bahwa jumlah kelompok pemangku kepentingan akan dipublikasikan, mereka memiliki insentif untuk memperluas pemetaan pemangku kepentingan sejak awal studi. Ini memperkuat praktik metodologis di hulu, bukan hanya komunikasi di hilir. Standar pengungkapan, dalam pengertian ini, bekerja dua arah: ia memperbaiki transparansi sekaligus meningkatkan kualitas analisis. Praktisi SROI yang berpengalaman umumnya menggunakan kriteria perbedaan dalam jenis perubahan yang dialami: jika dua kelompok mengalami jenis perubahan yang berbeda atau dengan magnitudo yang berbeda secara material, mereka dianggap kelompok berbeda.

Komponen 3: jumlah orang yang mengalami perubahan material

Komponen ketiga adalah jumlah orang yang mengalami perubahan material. Dalam contoh, jumlah itu adalah 33 orang. Komponen ini sering kali yang paling provokatif dalam diskusi awal, karena angka 33 terlihat sangat kecil dibandingkan dengan klaim CSR yang biasa kita dengar: "menjangkau 5.000 orang", "memberi manfaat kepada 12.000 keluarga". Justru di situlah letak kekuatan komponen ini: ia memaksa pembedaan antara jangkauan dan perubahan.

Dalam praktik komunikasi CSR Indonesia, kata "menjangkau", "memberi manfaat", dan "menerima" digunakan secara longgar. Seseorang yang menghadiri satu lokakarya selama dua jam dapat dihitung sebagai "satu orang penerima manfaat". Seseorang yang menerima satu kemasan bantuan logistik dapat dihitung sebagai "satu keluarga terbantu". Total angka yang dihasilkan terlihat impresif: ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, tetapi tidak menggambarkan apa pun tentang kedalaman perubahan yang sebenarnya terjadi.

SROI yang dilakukan dengan benar membedakan tiga lapisan: reach (orang yang tersentuh oleh kegiatan), engagement (orang yang berinteraksi cukup mendalam dengan program), dan material change (orang yang mengalami perubahan yang signifikan dan dapat dibuktikan). Hanya lapisan ketiga yang seharusnya dihitung sebagai dasar perhitungan nilai SROI. Maka, jumlah orang yang mengalami perubahan material adalah angka yang paling jujur dan paling representatif dari kedalaman dampak.

Mengapa angka ini penting untuk diungkap secara publik? Karena ia memungkinkan pembaca menghitung sesuatu yang sangat berguna: nilai sosial per orang yang berubah. Jika sebuah program

mengklaim rasio 1 :5 dengan investasi total Rp 500 juta dan 100 orang mengalami perubahan material, maka nilai per orang adalah Rp 25 juta. Jika program lain mengklaim rasio yang sama dengan investasi Rp 5 miliar dan 100 orang mengalami perubahan, maka nilai per orang adalah Rp 250 juta. Kedua program menghasilkan rasio yang sama, tetapi struktur ekonominya sangat berbeda. Pembaca yang melihat angka ini dapat segera bertanya: apakah program kedua benar-benar menciptakan perubahan yang sepuluh kali lebih dalam, atau apakah ada agresivitas dalam asumsi monetisasi?

Komponen ini juga menjadi penangkal terhadap aggregation washing. Ketika jumlah orang yang berubah disebutkan secara spesifik, sulit untuk menyembunyikan fakta bahwa “rasio impresif” sebenarnya hanya berlaku untuk kelompok kecil. Sebaliknya, ketika jumlah orang yang berubah cukup besar, klaim rasio menjadi lebih kredibel karena tersebar di banyak kasus. Tantangan implementasinya adalah ketegasan dalam mendefinisikan apa yang dianggap “perubahan material”. Dalam praktik, perubahan material adalah perubahan yang dianggap signifikan oleh pemangku kepentingan yang mengalaminya, didukung oleh bukti yang cukup, dan berkontribusi nyata terhadap nilai yang dimonetisasi.

Komponen 4: distribusi manfaat antar pemangku kepentingan

Keadilan distributif berkaitan dengan alokasi sumber daya, manfaat, dan beban yang adil di antara anggota masyarakat. Dalam konteks proyek atau program sosial, keadilan distributif menuntut agar kita tidak hanya melihat berapa besar total nilai yang diciptakan, tetapi juga siapa yang sebenarnya menikmati nilai tersebut. Dalam studi SROI tradisional, sering kali terjadi agregasi di mana nilai yang dinikmati oleh perusahaan (seperti penghematan biaya operasional atau peningkatan aset) dijumlahkan dengan nilai yang diterima oleh komunitas. Tanpa pemisahan ini, sebuah program dapat terlihat sangat "berdampak" secara total, padahal kenyataannya sebagian besar manfaat finansialnya justru terserap kembali oleh penyelenggara program.

Teori keadilan distributif, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan bahwa pengaturan ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam SROI, hal ini dapat dioperasionalisasikan melalui komponen keempat: distribusi manfaat antar pemangku kepentingan. Komponen ini menuntut organisasi untuk mengungkapkan secara transparan persentase nilai yang mengalir ke masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Ada satu ketentuan yang mengikat dan tidak boleh dilanggar: jumlah entri dalam Komponen 4 harus sama persis dengan jumlah kelompok pemangku kepentingan yang disebutkan dalam Komponen 2. Jika Komponen 2 menyatakan 7 kelompok, maka Komponen 4 harus mencantumkan distribusi untuk ketujuh kelompok itu — tidak boleh diagregasi menjadi lebih sedikit. Ketentuan ini adalah mekanisme saling kunci yang mencegah organisasi mengklaim melibatkan banyak kelompok di Komponen 2 namun menyembunyikan distribusi yang tidak merata di Komponen 4.

Pentingnya komponen ini didukung oleh fakta bahwa persepsi keadilan di dalam sebuah kelompok sering kali didasarkan pada bagaimana imbalan dan biaya dibagi secara adil. Jika sebuah program pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir Indonesia menghasilkan nilai yang besar namun 80%-nya dinikmati oleh koperasi nelayan atau pedagang perantara, maka program tersebut secara distributif

tidak adil bagi nelayan yang menjadi subjek program tersebut. Dengan mewajibkan pengungkapan distribusi manfaat, standar SROI beralih dari sekadar instrumen akuntansi menjadi instrumen keadilan sosial.

Komponen 5: komposisi nilai sosial, ekonomi, lingkungan

Komponen kelima adalah komposisi nilai berdasarkan tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam contoh, komposisinya adalah sosial 34%, ekonomi 48%, lingkungan 18%. Komponen ini menjawab risiko *impact washing* yang berkaitan dengan identitas program, yaitu kecenderungan untuk menyajikan program dalam bingkai yang paling menguntungkan secara reputasi, meskipun struktur nilai sebenarnya berbeda.

Banyak program CSR di Indonesia diberi label "program pemberdayaan masyarakat" atau "program lingkungan", padahal struktur nilai yang sebenarnya dihasilkan tidak selalu sesuai dengan label tersebut. Sebuah program yang disebut "pemberdayaan masyarakat" mungkin pada kenyataannya menghasilkan 80% nilai dari penghematan biaya operasional perusahaan, bukan dari perubahan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, sebuah program yang disebut "program efisiensi energi" mungkin menghasilkan nilai yang sebagian besar mengalir ke peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Tanpa pengungkapan komposisi, pembaca tidak dapat memeriksa kesesuaian antara label program dan struktur nilainya.

Mengapa tiga dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan? Karena ketiga dimensi ini sudah menjadi bahasa umum dalam dunia keberlanjutan, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang dapat memahaminya tanpa perlu pelatihan tambahan. Tiga dimensi ini juga selaras dengan kerangka triple bottom line yang sudah lama dikenal di komunitas bisnis Indonesia, dan dengan tiga huruf E-S-G *(environmental, social, governance)* yang sekarang dominan di kalangan investor.

Bagaimana praktisi membagi nilai ke dalam tiga kategori ini? Pembagian dilakukan dengan menelusuri sumber proxy keuangan untuk setiap komponen nilai. Nilai yang berasal dari peningkatan kesehatan, pendidikan, kohesi sosial, atau kesetaraan dimasukkan ke dimensi sosial. Nilai yang berasal dari pendapatan, pekerjaan, efisiensi biaya, atau pembentukan aset dimasukkan ke dimensi ekonomi. Nilai yang berasal dari pengurangan emisi, konservasi sumber daya, restorasi ekosistem, atau pencegahan polusi dimasukkan ke dimensi lingkungan. Untuk komponen nilai yang lintas dimensi (misalnya peningkatan kapasitas petani yang sekaligus menghasilkan dampak ekonomi dan lingkungan), praktisi melakukan alokasi proporsional sesuai sifat outcome.

Komponen ini juga memberi sinyal penting tentang sifat program. Program dengan komposisi sosial yang dominan biasanya berorientasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas. Program dengan komposisi ekonomi yang dominan biasanya berorientasi efisiensi dan pendapatan. Program dengan komposisi lingkungan yang dominan biasanya berorientasi konservasi dan transisi. Dengan melihat komposisi, pembaca dapat segera menilai apakah program tersebut sesuai dengan strategi keberlanjutan organisasi yang mengklaimnya. Lebih jauh, pengungkapan komposisi mendorong perusahaan untuk menyusun portofolio program yang lebih berimbang.

Sebuah ilustrasi: dua program, satu rasio, dua realitas

Untuk menggambarkan kekuatan lima komponen ini secara konkret, marilah kita bandingkan dua program hipotetis yang sama-sama menghasilkan rasio SROI 1 : 2,73, tetapi dengan pengungkapan komponen yang sangat berbeda

> *"Program A: "SROI program ini sebesar 1 : 2,73 untuk periode 2023–2024, mencakup 7 kelompok pemangku kepentingan, dengan 33 orang mengalami perubahan material. Distribusi manfaat: petani peserta 28%, keluarga petani 16%, koperasi mitra 14%, pemerintah desa 12%, lembaga keuangan 10%, komunitas sekitar 12%, tenaga kerja program 8%. Komposisi nilai: sosial 34%, ekonomi 48%, lingkungan 18%."*

> *"Program B: "SROI program ini sebesar 1 : 2,73 untuk periode 2020–2024, mencakup 2 kelompok pemangku kepentingan, dengan 1.450 orang mengalami perubahan material. Distribusi manfaat: penerima bantuan langsung 63%, perusahaan penginvestasi 37%. Komposisi nilai: sosial 92%, ekonomi 6%, lingkungan 2%."*

Tanpa pengungkapan ini, kedua program tampak identik di mata publik. Keduanya memiliki rasio yang sama, dan keduanya akan mendapat porsi yang sama di siaran pers. Tetapi dengan pengungkapan lima komponen, perbedaan substantif keduanya menjadi terlihat dalam hitungan detik.

Program A adalah program yang relatif kecil dalam jangkauan (33 orang) tetapi mendalam dan luas dalam perspektif (7 kelompok pemangku kepentingan). Periode analisisnya pendek dan baru, sehingga rasio mencerminkan kondisi terkini. Distribusi manfaatnya tersebar di seluruh ketujuh kelompok — tidak ada satu pun yang mendominasi secara ekstrem, dan tidak ada porsi yang mengalir kembali ke perusahaan — mengindikasikan bahwa nilai benar-benar bergerak ke komunitas. Komposisi nilainya berimbang antara sosial, ekonomi, dan lingkungan, menunjukkan bahwa program ini berfungsi sebagai intervensi multi-dimensi. Pembaca yang melihat profil ini dapat menyimpulkan bahwa Program A kemungkinan adalah program kemitraan yang serius dengan analisis dampak yang berimbang dan berkeadilan distributif.

Program B adalah program yang jauh lebih luas jangkauannya (1.450 orang) tetapi sangat sempit dalam perspektif analisis (hanya 2 kelompok pemangku kepentingan). Periode analisisnya panjang (lima tahun), sehingga akumulasi nilai mungkin menjadi alasan rasio besar. Komposisi nilainya hampir seluruhnya sosial, dengan dimensi lingkungan yang nyaris diabaikan. Pembaca yang melihat profil ini dapat segera mengajukan pertanyaan yang tajam: mengapa hanya 2 kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan? Apakah perusahaan menghindari berbicara dengan pihak yang mungkin punya pandangan kritis? Mengapa dimensi lingkungan begitu kecil padahal program ini berlangsung di wilayah yang sensitif secara ekologis?

Yang penting dari ilustrasi ini bukan bahwa Program A "baik" dan Program B "buruk". Mungkin Program B memang program bantuan langsung yang valid; mungkin Program A memang program yang dirancang dengan baik. Yang penting adalah bahwa pengungkapan lima komponen mengubah ruang interpretasi pembaca dari ruang yang gelap menjadi ruang yang dapat dievaluasi. Pembaca tidak lagi hanya melihat angka, ia melihat kontur program di balik angka. Dan dengan kontur itu, pertanyaan-pertanyaan kritis dapat diajukan sebelum angka diterima sebagai kebenaran. Inilah mekanisme inti yang

menahan *impact washing*: bukan dengan menghukum yang bersalah, melainkan dengan memberi pembaca alat untuk membedakan yang serius dari yang dangkal.

Bagaimana standar ini menjawab delapan prinsip Social Value International

Standar pengungkapan lima komponen ini bukan merupakan inovasi yang berdiri sendiri di luar tradisi metodologis, melainkan sebuah operasionalisasi praktis untuk memastikan delapan prinsip utama Social Value International (SVI) dipatuhi secara transparan di hadapan publik. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana standar ini menjawab masing-masing prinsip tersebut, dengan penekanan khusus pada prinsip kedelapan yang baru saja diperkenalkan.

Prinsip 1 : Melibatkan Pemangku Kepentingan (Involve Stakeholders)

Prinsip ini dijawab langsung oleh Komponen 2 (Cakupan Pemangku Kepentingan). Dengan mewajibkan jumlah kelompok yang terlibat disebutkan dalam pengungkapan publik, kita menciptakan tekanan bagi praktisi untuk tidak melakukan studi "dari belakang meja". Ini memastikan bahwa nilai yang dihitung mencerminkan perspektif mereka yang terdampak, bukan sekadar asumsi internal organisasi.

Prinsip 2: Memahami Apa yang Berubah (Understand What Changes)

Prinsip ini dijawab oleh Komponen 3 (Jumlah Orang yang Mengalami Perubahan Material). Prinsip ini menuntut agar kita tidak hanya fokus pada output (jumlah sesi pelatihan) tetapi pada hasil nyata yang dialami oleh orang-orang tersebut. Komponen 3 memaksa organisasi untuk membuktikan bahwa perubahan benar-benar terjadi pada tingkat individu melalui bukti empiris.

Prinsip 3: Menghargai Hal-hal yang Penting (Value the Things that Matter)

Prinsip ini dijawab oleh Komponen 4 (Distribusi Manfaat) dan Komponen 5 (Komposisi Nilai). Dengan mengungkapkan siapa yang menerima manfaat dan di mana nilai terbesar berasal, organisasi menunjukkan apa yang mereka anggap paling berharga dalam program tersebut. Hal ini mencegah "tirani angka" dengan memberikan bobot pada hasil sosial yang sering kali dianggap tidak berharga dalam sistem pasar tradisional.

Prinsip 4: Hanya Memasukkan yang Material (Only Include What is Material)

Prinsip materialitas didukung oleh Komponen 3. Dalam SROI, hanya informasi dan perubahan yang cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan pemangku kepentingan yang harus dimasukkan. Dengan menyebutkan jumlah individu yang mengalami perubahan material, organisasi secara implisit mengakui bahwa mereka telah melakukan proses penyaringan terhadap hasil-hasil yang tidak material.

Prinsip 5: Jangan Mengklaim Berlebihan (Do Not Overclaim)

Prinsip ini dijawab secara kolektif oleh seluruh komponen, terutama dengan adanya pengungkapan periode dan jumlah orang yang berubah. SROI menuntut penggunaan teknik pengurangan dampak seperti deadweight dan attribution untuk memastikan angka rasio tidak bias dan jujur. Tanpa transparansi ini, rasio besar bisa jadi hanyalah hasil dari klaim sepihak atas perubahan yang sebenarnya disebabkan oleh faktor lain.

Prinsip 6: Bersikap Transparan (Be Transparent)

Transparansi adalah roh dari seluruh standar pengungkapan lima komponen ini. Lima komponen tersebut pada dasarnya adalah ringkasan dari seluruh asumsi, metodologi, dan batasan analisis yang memungkinkan pihak luar untuk meninjau kembali bagaimana angka rasio tersebut diperoleh. Ini adalah jembatan antara kerahasiaan data teknis dan hak publik untuk tahu.

Prinsip 7: Verifikasi Hasilnya (Verify the Result)

Meskipun verifikasi pihak ketiga tidak disebutkan sebagai komponen numerik, standar ini mendorong adanya penjaminan independen. Standar pengungkapan yang konsisten mempermudah auditor atau praktisi tersertifikasi untuk melakukan audit cepat terhadap kewajaran klaim sebelum membaca laporan naratif yang lengkap.

Prinsip 8: Bersikap Responsif (Be Responsive)

Prinsip kedelapan, yang secara resmi diperkenalkan oleh SVI pada tahun 2021, adalah prinsip manajemen yang menuntut organisasi untuk merespons hasil pengukuran dampak dengan tindakan nyata. Prinsip ini menyatakan bahwa optimasi nilai sosial hanya bisa dicapai jika pengambilan keputusan dilakukan secara tepat waktu dan didukung oleh akuntansi dan pelaporan yang tepat.

Standar lima komponen menjawab prinsip Be Responsive dengan cara-cara berikut:

- Mengoptimalkan Kesejahteraan: Dengan mengetahui distribusi manfaat (Komponen 4), manajemen dapat melihat kelompok mana yang kurang mendapatkan manfaat dan segera menyesuaikan aktivitas program untuk mengoptimalkan kesejahteraan mereka
- Manajemen Dampak Terstruktur: Prinsip ini mewajibkan adanya pendekatan manajemen dampak yang memandu pengambilan keputusan di tingkat strategis, taktis, dan operasional.[8] Data dari komposisi nilai (Komponen 5) membantu manajemen memutuskan apakah akan meneruskan, menghentikan, atau mereplikasi suatu inisiatif.
- Akuntabilitas kepada Stakeholder: Bersikap responsif berarti bertanggung jawab kepada mereka yang hidupnya terpengaruh oleh program. Melalui standar pengungkapan ini, organisasi menunjukkan komitmen untuk mendengarkan umpan balik pemangku kepentingan dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan dampak positif serta mengurangi dampak negatif.
- Iterasi Berkelanjutan: Prinsip Be Responsive mengubah SROI dari sekadar "latihan pelaporan sekali

jalan" menjadi sebuah sistem manajemen yang hidup. Standar lima komponen memberikan data granular yang diperlukan manajemen untuk melakukan refleksi konstan dan adaptasi guna mencapai perbaikan berkelanjutan.

Jalur adopsi: dari gagasan menjadi norma

Sebuah usulan tidak menjadi standar hanya karena ia ditulis. Ia menjadi standar melalui proses adopsi yang bertahap dan strategis. Untuk usulan lima komponen ini, ada tiga fase adopsi yang realistis untuk konteks Indonesia.

Fase pertama: adopsi sukarela oleh praktisi etis dan perusahaan progresif. Dalam fase ini, beberapa praktisi SROI bersertifikat mulai memasukkan format pengungkapan lima komponen di setiap laporan dan publikasi mereka. Beberapa perusahaan yang ingin menonjolkan kredibilitasnya juga mulai menggunakan format ini di laporan keberlanjutan. Tujuan fase ini bukan jangkauan luas, melainkan mendemonstrasikan bahwa standar dapat diterapkan tanpa beban yang tidak realistis. Fase ini diperkirakan berlangsung satu hingga dua tahun.

Fase kedua: adopsi oleh asosiasi profesional dan platform pelaporan. Setelah cukup banyak contoh penerapan, asosiasi praktisi dampak sosial Indonesia dapat menjadikan lima komponen sebagai bagian dari kode etik atau standar praktik. Lembaga yang menyelenggarakan penghargaan keberlanjutan dapat menjadikannya kriteria kelayakan. Platform pelaporan keberlanjutan dapat menyertakannya sebagai field standar. Pada fase ini, standar mulai berfungsi sebagai sinyal kualitas dalam ekosistem. Praktisi yang patuh menjadi pembeda dari yang tidak. Fase ini diperkirakan berlangsung dua hingga tiga tahun setelah fase pertama.

Fase ketiga: adopsi regulatori. Setelah praktik telah cukup matang dan demonstrasi telah cukup kuat, regulator dapat memasukkan kewajiban pengungkapan lima komponen dalam regulasi pelaporan keberlanjutan. Otoritas Jasa Keuangan dapat memasukkannya dalam revisi POJK Keuangan Berkelanjutan. Kementerian BUMN dapat mewajibkannya untuk pelaporan dampak BUMN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Sosial dapat mewajibkannya untuk program yang menerima dana publik. Pada fase ini, standar berhenti menjadi konvensi dan mulai menjadi norma.

Penting dicatat bahwa jalur tiga fase ini mencerminkan bagaimana sebagian besar standar pengungkapan global sebenarnya berkembang. GRI dimulai sebagai konvensi sukarela sebelum diadopsi luas. ISSB dimulai dari kebutuhan investor sebelum dimasukkan ke regulasi nasional. SROI sendiri dimulai dari komunitas praktisi sebelum diakui oleh lembaga seperti UNDP. Standar pengungkapan lima komponen mengikuti pola yang sama, tetapi dengan kekhasan: ia dirancang sejak awal untuk konteks komunikasi publik di negara dengan ekosistem CSR yang luas dan beragam.

Untuk mempercepat fase pertama, beberapa langkah awal dapat dilakukan: penerbitan panduan teknis ringkas yang menjelaskan cara menghitung setiap komponen, penerbitan template format yang siap pakai untuk laporan dan siaran pers, kerjasama dengan beberapa perusahaan pelopor untuk mendemonstrasikan penerapan, dan pelatihan singkat bagi praktisi SROI tersertifikasi. Inisiatif ini dapat

dipimpin oleh asosiasi praktisi, atau oleh konsorsium beberapa perusahaan yang bersedia bertindak sebagai pelopor.

Risiko jika kita tidak melakukan ini

Selain melihat manfaat dari mengadopsi standar pengungkapan, kita juga perlu jujur tentang risiko jika kita tidak melakukannya. Tanpa standar pengungkapan SROI yang konsisten, beberapa skenario buruk menjadi semakin mungkin.

Skenario pertama: SROI sebagai disiplin kehilangan kredibilitas. Jika klaim rasio yang tidak dapat diverifikasi terus berlanjut tanpa konteks, lambat laun investor, regulator, akademisi, dan masyarakat sipil akan kehilangan kepercayaan pada metodologi ini secara umum. Yang dirugikan bukan hanya pelaku yang tidak jujur, tetapi juga praktisi yang serius yang telah menginvestasikan tahun-tahun untuk membangun keahlian metodologis. Sebuah disiplin tidak rusak oleh kritik; ia rusak oleh ketidakpercayaan yang menyebar.

Skenario kedua: regulator memaksakan standar yang lebih kaku dari luar. Ketika ekosistem industri tidak mampu mengatur dirinya sendiri, regulator akan masuk dengan standar yang biasanya dirancang dengan mentalitas kepatuhan, bukan dengan pemahaman metodologi. Hasilnya adalah standar yang membebani tanpa benar-benar meningkatkan kualitas. Dengan merintis standar dari dalam komunitas praktisi, kita mempertahankan kualitas substantif sembari memberikan jawaban yang dapat diterima oleh regulator.

Skenario ketiga: metodologi asing mengisi kekosongan. Tanpa standar yang dirancang untuk konteks Indonesia, ekosistem laporan dampak Indonesia akan didominasi oleh metodologi yang dikembangkan di tempat lain dan tidak selalu sesuai dengan profil pemangku kepentingan, struktur ekonomi, dan kapasitas analitis di sini. Indonesia akan menjadi pengikut, bukan pelopor.

Skenario keempat: kepercayaan publik pada laporan keberlanjutan secara luas terkikis. Ketika satu domain pelaporan dampak dianggap tidak kredibel, efeknya akan meluas ke domain lain. Laporan keberlanjutan secara keseluruhan dapat kehilangan otoritasnya, menyulitkan organisasi yang serius untuk mengkomunikasikan kontribusinya kepada publik. Risiko-risiko ini bukan hipotetis. Beberapa di antaranya sudah mulai terlihat dalam diskusi profesional: keluhan investor tentang sulitnya memverifikasi klaim, kritik akademik tentang ketidakkonsistenan rasio antar studi, kebingungan jurnalis ketika harus melaporkan angka SROI tanpa konteks. Standar pengungkapan lima komponen adalah cara proaktif untuk mengubah lintasan ini sebelum risiko-risiko itu menjadi kenyataan yang permanen.

Penutup: standar ringkas adalah bentuk hormat pada substansi

Mungkin ada yang akan berkata bahwa lima komponen terlalu kecil untuk disebut standar. Hanya satu kalimat. Hanya empat informasi. Apakah benar perubahan sebesar itu yang sedang kita usulkan?

Justru kebesaran dari standar ini terletak pada keringkasannya. Sejarah standar pengungkapan menunjukkan bahwa yang paling berhasil adalah yang paling mudah diingat dan diterapkan. Label gizi yang menyebutkan kalori, lemak, gula, dan natrium telah mengubah cara kita berbelanja, bukan karena

ia rumit, tetapi karena ia konsisten ada di setiap kemasan. Peringkat bintang energi telah mengubah pasar peralatan rumah tangga, bukan karena ia berisi seluruh laporan teknis, tetapi karena ia memungkinkan keputusan cepat. Label asal usul produk telah mengubah pola konsumsi, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia hadir di mana-mana.

Standar pengungkapan SROI lima komponen mengikuti tradisi yang sama. Ia tidak berusaha menjadi pengganti laporan lengkap. Ia tidak berusaha mengukur segala hal. Ia hanya berusaha memastikan bahwa setiap kali angka rasio SROI muncul di hadapan publik, lima informasi penting ikut bergerak bersamanya. Periode. Cakupan pemangku kepentingan. Jumlah orang yang berubah. Distribusi manfaat. Komposisi nilai. Lima hal yang cukup untuk menggeser ruang interpretasi dari ruang gelap menjadi ruang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, standar pengungkapan adalah bentuk hormat. Hormat kepada metodologi, dengan tidak membiarkannya direduksi menjadi satu angka yang menyesatkan. Hormat kepada pemangku kepentingan, dengan menjamin keberadaan mereka tidak hilang dalam komunikasi publik. Hormat kepada pembaca, dengan memberi mereka alat untuk berpikir kritis. Dan hormat kepada masa depan disiplin pengukuran dampak di Indonesia, dengan memastikan bahwa ia tumbuh dalam ekosistem yang menghargai substansi melebihi kemasan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan standar pengungkapan SROI. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memulainya, dan kapan. Tulisan ini adalah ajakan untuk memulainya sekarang.

PERNYATAAN UMUM *(DISCLAIMER)*

Seluruh penunjukan, pendapat, dan ekspresi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Isi tulisan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi Social Investment Indonesia maupun mitra- mitra strategisnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu hukum, batas teritorial, dan kelembagaan. Setiap analisis, interpretasi, dan sudut pandang yang digunakan disampaikan dalam kerangka akademik dan dialogis, serta tidak dimaksudkan untuk mewakili posisi institusional organisasi manapun.

Social Investment Indonesia
E-mail: info@socialinvestment.id

TENTANG SOCIAL INVESTMENT INDONESIA (SII)

Social Investment Indonesia (SII) adalah inisiatif independen yang mendorong praktik investasi sosial yang berdampak, terukur, dan kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Melalui layanan pengetahuan, fasilitasi multipihak, dan verifikasi dampak, SII berupaya memperkuat tata kelola sosial yang inklusif dan berbasis nilai.

Social Investment Indonesia